

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan masih merupakan masalah terbesar di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari *Millennium Development Goals* (MGDs) untuk tahun 2000–2015, yang telah disetujui oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Tujuan ini menempatkan kemiskinan sebagai prioritas utama. Dari delapan komponen *Millennium Development Goals* (MDGs), penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan prioritas utama. Penurunan kemiskinan adalah salah satu indikator yang berada dalam kategori merah atau belum tercapai, menurut evaluasi dan pengawasan pencapaian *Millennium Development Goals* (Bappenas, 2024). MDGs terus berkembang dan masuk ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan, dengan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama SDGs yang harus dicapai oleh semua negara di dunia.

Kemiskinan adalah sebuah masalah sosial yang sudah berlangsung lama dan masih sulit diatasi hingga saat ini. Beberapa indikator kemiskinan meliputi ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, rendahnya produktivitas dan penghasilan yang diperoleh, terbatasnya akses serta kemampuan, dan minimnya peluang untuk mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kesejahteraan hidup. (Putri et al., 2019).

Menurut Ningsih et al., (2023) tingkat inflasi yang tinggi, upah yang rendah, investasi yang rendah, penyerapan tenaga kerja yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang begitu lamban adalah beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Selain itu, menurut Ihsan & Ikhsan, (2018) kemiskinan disebabkan oleh penurunan produktivitas masyarakat, serta keterbatasan biaya, kesulitan mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, pengangguran, dan kebutuhan hidup yang layak. Menurut Ristika et al., (2021) terdapat beberapa penyebab kemiskinan, termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak

terkontrolnya sumber daya alam (SDA), tingkat pendidikan yang masih rendah, ketidaktahuan tentang cara mengembangkan sektor-sektor perekonomian, tingkat pengangguran yang terus meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun. Selain itu, menurut Afandi et al., (2017) kemiskinan yang disebabkan oleh faktor turun-temurun yang terjadi di seluruh dunia. Anak laki-laki atau anak perempuan yang dibesarkan oleh orang tua yang hidup dalam keluarga miskin juga akan hidup dalam kemiskinan, sama seperti orang tua mereka. Pada kenyataannya, fenomena ini umum di Indonesia.

Menurut World Population Review, Indonesia masuk dalam daftar 100 negara dengan pendapatan nasional per kapita terendah, berada di urutan ke-73 pada tahun 2020 dan turun ke posisi ke-90 pada tahun 2023, dengan PDB sebesar \$15.836 menurut data dari Global Finance (2024). (Global Finance, 2024) Meskipun posisi ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara, isu kemiskinan tetap menjadi perhatian utama yang perlu ditangani oleh pemerintah, baik di negara maju maupun berkembang seperti Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluarannya berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan ini mencerminkan jumlah uang yang diperlukan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, termasuk kebutuhan makanan dan non-makanan (BPS, 2024b).

Menurut Kasriyati (2018), terdapat tiga karakteristik unik dari kemiskinan di Indonesia: 1) Sebagian besar rumah tangga hidup di dekat garis kemiskinan nasional, menjadikan banyak orang rentan jatuh ke dalam kemiskinan; 2) Pengukuran kemiskinan di Indonesia tidak didasarkan pada garis kemiskinan yang sesungguhnya, melainkan pada pendapatan yang diperoleh; dan 3) Luasnya wilayah Indonesia serta perbedaan yang signifikan antar daerah merupakan faktor utama yang menandai kemiskinan di negara ini.

Pada 3 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memengaruhi ekonomi dan kesehatan negara. Hasil penelitian yang dilakukan Hasuman pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perekonomian. Ini karena pandemi Covid-19 dan banyak pembatasan yang mengurangi kapasitas produksi (Hausmann, 2020).

Hal yang sama dipaparkan oleh Barro et al., (2020) yang menemukan bahwa pandemi Covid-19 menurunkan *Gross Domestic Product* (GDP) pada tahun 2020. *National Bureau of Economic Research* (NBER) juga menemukan bahwa penurunan produksi menyebabkan penurunan tenaga kerja, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan peningkatan kemiskinan (Han et al., 2020).

Menurut laporan dari Bank Dunia pada April 2021, kemiskinan ekstrem meningkat secara global untuk pertama kalinya pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 (Risnita & Marna, 2021). Sekitar 120 juta orang terperosok ke dalam kemiskinan akibat pandemi ini, dan angka tersebut diperkirakan akan naik menjadi sekitar 150 juta pada akhir tahun 2021. Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa jumlah orang miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan meningkat dari 26,42 juta menjadi 27,54 juta jiwa, atau dari 9,78 persen menjadi 10,14 persen, antara Maret 2020 dan Maret 2021.



*Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*

Sumber: BPS, diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Akan tetapi, persentase penduduk miskin di perdesaan memiliki trend penurunan dari 12,85% menjadi 12,22%. Artinya kebijakan pemerintah di wilayah perdesaan sudah tepat sasaran dan efektif sehingga terwujud tujuan dari penerapan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di perdesaan.

Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 kemiskinan di perdesaan berhasil turun kembali dari 12,29% pada tahun 2022 dan turun menjadi 12,22% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, inflasi nasional turun 1,32% dari September 2022 hingga Maret 2023 dibandingkan 3,60% dari September 2022. Kedua, nilai tukar petani (NTP) meningkat menjadi 110,85 pada Maret 2023 dari 106,82 pada September 2022. Ketiga, upaya terus menerus untuk bantuan sosial untuk mengurangi biaya bagi penduduk miskin melalui penggunaan bansos Program Keluarga Harapan.

Kemiskinan di perkotaan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Pada

September 2019, persentase penduduk miskin di perkotaan 6,56 persen (9,86 juta orang). Selama pandemi, pada Maret 2021, angkanya mencapai 7,89 persen (12,18 juta orang). Meski di masa pemulihan ekonomi dapat diturunkan kembali, pada Maret 2023 angkanya masih 7,29 persen atau 11,74 juta orang. Artinya, bertambah 1,88 juta orang dibanding sebelum pandemi. Sebaliknya, kemiskinan di perdesaan justru lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Angkanya pada Maret 2023 sebanyak 14,16 juta orang (12,22 persen, turun dibanding September 2019 yang 14,93 juta orang (12,60 persen). Meski secara absolut kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibanding kota, penurunan kemiskinan kota yang relatif lebih lambat perlu jadi perhatian.

Kemiskinan kota tak bisa dijelaskan dengan satu penyebab tunggal. Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka berakhir terjebak pada lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapat pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Banyak dari mereka akhirnya bekerja di sektor informal. Pada Februari 2023, proporsi penduduk yang bekerja di sektor informal perkotaan 44,12%. Maraknya urbanisasi yang tak didukung kesiapan kota perlu dievaluasi bersama. Apalagi ke depannya, jumlah penduduk di perkotaan diprediksi terus meningkat (Retnosari, 2023).

Hasil pendataan *Long Form SP2020* yang dilaksanakan BPS menunjukkan pada tahun 2022, terdapat 56,40% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Angka ini diestimasi meningkat menjadi 66,60% pada 2035. Bank Dunia bahkan memprediksi sekitar 70% pada 2045. Menjadi peluang baik untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga membawa tantangan untuk mengelolanya lebih serius lagi.

Kebutuhan akan perumahan meningkat seiring dengan populasi yang meningkat di perkotaan. Selain itu, upaya untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga tak mampu harus ditingkatkan. Seringkali, orang yang miskin atau tidak mampu dipaksa tinggal di tempat

yang tidak layak, yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Dengan keadaan ini, ketimpangan perkotaan semakin terlihat.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara terpisah dari isu-isu terkait lainnya, seperti pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus melibatkan kolaborasi dari berbagai sektor, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta mengintegrasikan berbagai aspek secara terkoordinasi dan holistik (Annur, 2013).

Angka kemiskinan Indonesia berfluktuasi dari 2019 hingga 2023 secara nasional; namun, hingga tahun 2023, ada kemungkinan penurunan. Kecenderungan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang meningkatkan kemampuan masyarakat. Sebaliknya, pandemi menyebabkan ketidakstabilan inflasi yang meningkatkan angka kemiskinan..

*Tabel 1. 1 Penduduk Miskin Perkotaan di Indonesia*

<b>Tahun</b>	<b>Penduduk Miskin (ribu jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2019	9.994,82	6,69
2020	11.161,96	7,38
2021	12.176,57	7,89
2022	11.820,05	7,50
2023	11.736,36	7,29

Sumber: BPS, diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.1, kemiskinan perkotaan di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023 terjadi peningkatan, dari 6,69% pada tahun 2019 menjadi 7,29% pada tahun 2023. Kenaikan angka kemiskinan ini dapat dipengaruhi karena biaya hidup yang melonjak tinggi di suatu kota sebagai akibat dari rendahnya pendapatan masyarakat.

Kemiskinan kota pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan dari 6,69% pada tahun 2019 dan naik menjadi 7,89% pada tahun 2021. Dalam hal ini faktor yang menyebabkan naiknya kemiskinan di tahun 2019 sampai 2021

adalah dampak dari penyebaran pandemi Covid-19, yang mulai dirasakan pada tahun 2020 serta laju inflasi secara umum sangat tinggi hal itu terjadi karena pandemi Covid-19 memukul baik dari segi penawaran maupun permintaan dan banyaknya komoditas yang mengalami penurunan seperti beras, daging, ayam dan telur.

Kemiskinan di daerah perkotaan menunjukkan tren kenaikan, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, penurunan inflasi dari periode September 2022 hingga Maret 2023 yang sebesar 1,32%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi periode Maret 2022 hingga September 2022 yang mencapai 3,60%. Kedua, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 turun menjadi 6,40%, berkurang dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2022 yang sebesar 7,74%. Ketiga, berbagai program bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH), telah berperan dalam mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin.

Penurunan tingkat kemiskinan pada dasarnya bergantung pada hasil yang diperoleh. Hal ini tergantung pada seberapa efektif program itu dan berapa banyak orang yang menjadi penghalang untuk memerangi kemiskinan. Saat ini, masih ada wilayah yang menjadi kantung kemiskinan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat keparahan yang tinggi. Meskipun sejumlah besar dana telah dialokasikan untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan, sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Karena itu, saat ini masalah utama Indonesia terlihat jelas: tingkat kemiskinan yang masih tinggi, terutama di kota-kota besar.

Salah satu faktor yang dianggap dapat meningkatkan tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia adalah inflasi, yang umumnya didefinisikan sebagai kondisi ekonomi di mana harga barang terus meningkat. Menurut Fauza (2020) Inflasi dapat dikatakan meningkatkan kemiskinan karena harga barang umum

akan meningkat, membuat orang sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika ini terjadi, masyarakat akan jauh dari kata sejahtera.

Menurut Pratiwi (2022), inflasi dapat membawa dampak positif maupun negatif, tergantung pada tingkatannya. Inflasi yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan negara serta mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola inflasi dengan baik agar tidak menimbulkan efek buruk pada perekonomian.



*Gambar 1. 2 Persentase Inflasi Indonesia (yoy)*

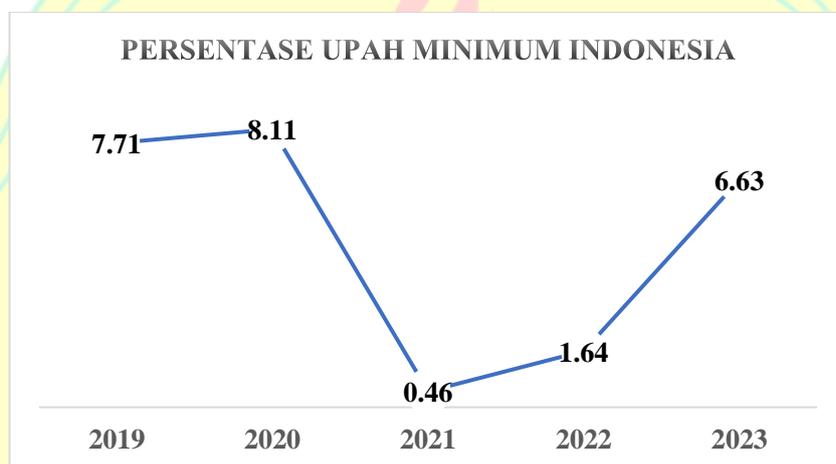
Sumber: BPS, diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuatif di sepanjang tahun 2019-2023. Tren inflasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ini mengalami kenaikan dari 2.48% menjadi 4.97%. (Bank Indonesia, 2024).

Mengatasi tekanan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas di seluruh dunia, terutama energi dan pangan, sebagai akibat dari konflik di Ukraina. Namun, dibandingkan dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang mencatat rekor tertinggi dalam empat puluh tahun terakhir, peningkatan inflasi di Indonesia jauh lebih lambat. Hal ini

disebabkan oleh peran penting APBN sebagai pengendali inflasi global melalui pembagian anggaran untuk stabilisasi harga pangan dan sistem subsidi energi (Kemenkeu, 2023).

Jika inflasi dapat dikendalikan dengan efektif, maka banyak orang miskin akan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari garis kemiskinan. Inflasi yang tinggi dapat merusak stabilitas ekonomi dan mengurangi nilai mata uang, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat dapat terjaga, sehingga memudahkan upaya pengentasan kemiskinan.



*Gambar 1.3 Persentase Upah Minimum Indonesia*

Sumber: BPS, diolah oleh penulis (2024)

Selain inflasi, upah minimum menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di wilayah perkotaan Indonesia mencapai puncaknya dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 12,18 juta orang. Hal ini sejalan dengan perubahan upah minimum terendah yang terjadi pada tahun 2021, dengan kenaikan sebesar 0,46%, menyentuh angka 0%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tidak mengalami kenaikan upah minimum. Persentase kenaikan upah minimum di Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan, dari 7,71% menjadi

6,63%. Upah yang rendah ini tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga menyulitkan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Indonesia secara teratur berupaya untuk menaikkan upah minimum setiap tahunnya di seluruh provinsi. Tujuannya adalah agar upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak bagi masyarakat. Namun, jika peningkatan upah minimum tidak memadai atau bahkan tidak mencukupi biaya hidup yang layak, maka upah tersebut tidak akan memberikan perbaikan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut Muharomi (2022), upah minimum berperan penting dalam menentukan ambang kemiskinan. Ketika upah minimum rendah, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, sedangkan dengan upah minimum yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan dapat menurun. Oleh karena itu, sangat krusial bagi masyarakat untuk meningkatkan upah minimum guna menghindari dan mengatasi berbagai bentuk kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah penyerapan tenaga kerja yang rendah. Seseorang harus bekerja dan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada masalah ketenagakerjaan saat ini: sebagian besar penduduk angkatan kerja di wilayah tersebut tidak bekerja atau memiliki pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah penduduk yang berhasil mendapatkan pekerjaan, yang mencerminkan ketersediaan dan pemenuhan lapangan kerja yang ada.

*Tabel 1. 2 Angkatan Kerja Perkotaan di Indonesia*

Tahun	Angkatan Kerja Perkotaan di Indonesia		
	Bekerja	Jumlah AK	Persentase Bekerja
2019	70.156.467	74.867.224	93,71
2020	69.486.481	76.339.972	91,02
2021	71.921.586	78.447.897	91,68
2022	74.884.110	81.163.249	92,26
2023	78.888.062	84.284.782	93,60

Sumber: BPS, diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan tabel di atas, tampak jelas bahwa data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Tren penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tercermin persentase penduduk yang bekerja berkisar 93,71% turun menjadi 93,60% pada tahun 2023. Walaupun cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020-2023 namun tenaga kerja perkotaan masih belum terserap dengan baik dan masih rendah dibandingkan tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum terserap mengakibatkan tidak memiliki pendapatan.

Yustitia et al. (2022) menyatakan bahwa memperluas kesempatan kerja dapat membantu mengurangi jumlah orang miskin. Ketika lebih banyak lapangan pekerjaan tersedia, lebih banyak orang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.

Sumber daya menjadi sia-sia dan pendapatan masyarakat berkurang, tenaga kerja yang tidak terserap pada akhirnya akan merugikan negara itu sendiri. Dalam teori, ketidakadaan pekerjaan berarti tidak ada pemasukan, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Windra et al., 2016). Jika kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan kemiskinan. Ini adalah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang sangat memungkinkan berperan sebagai penyebab kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan masalah tersebut, peneliti ingin menyelidiki bagaimana inflasi, upah minimum, penyerapan tenaga kerja, dan pandemi Covid-19 berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini memperbarui studi sebelumnya dengan menggunakan data yang lebih terbaru, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada wilayah perkotaan di Indonesia, yang menarik untuk diteliti karena masih sedikit data yang tersedia dari studi-studi sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan peneliti sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan Perkotaan di Indonesia

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil atau temuan dari penelitian ini akan memperluas wawasan bagi pembaca, khususnya mengenai pengaruh inflasi, upah minimum, penyerapan tenaga kerja, dan pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan di Indonesia

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang berdampak pada kemiskinan di kawasan perkotaan Indonesia.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperdalam pemahaman dan pengetahuan peneliti, terutama tentang kemiskinan di wilayah perkotaan, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan dampaknya di Indonesia.

